**PERAN SUPERVISI MANAJERIAL PENGAWAS SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI DI KABUPATEN SOPPENG**

Oleh: MULIADI

Universitas Negeri Makassar Jl. Bonto Langkasa, Makassar-90222,

Tlp.(04011) 830366, tlp/fax. (0411) 855288, E-mail: Pasca@unm.ac.id, Website:http://www.pps.unm.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) peran supervisi manajerial pengawas sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Soppeng, (ii) dampak supervisi manajerial pengawas sekolah dalam pelaksanaan program dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Soppeng, (iii) faktor-faktor yang mempengaruhi supervisi pelaksanaan dana BOS sehingga dapat dikatakan berjalan baik atau tidak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan informan penelitian adalah Pengawas SMK Negeri di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, Kepala SMK Negeri se Kabupaten Soppeng dan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten Soppeng.Perolehan data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu; wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukan bahwa; (i) peran supervisi manajerial pengawas dalam pelaksanaan program dana BOS terhadap sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng; membantu Sekolah dalam merumuskan anggaran sekolah yang merujuk pada peraturan pemerintah pusat dan daerah, membina Panitia BOS tingkat satuan pendidikan dalam hal pengelolaan keuangan sekolah yang transparan, efesien, dan akuntabel, mengimplementasikan pembuatan laporan keuangan yang dibuat sekolah kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. (ii) dampak supervisi manajerial pengawas dalam pelaksanaan program dana BOS terhadap sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng yaitu; keberadaan program BOS mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, administrasi sekolah, kebutuhan laboratorium, pemeliharaan sarana prasarana dan daya dan jasa. (iii) faktor yang mempengaruhi supervisi pelaksanaan BOS yaitu itikad baik kepala sekolah untuk menerima masukan dari pengawas, regulasi pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas untuk melibatkan pengawas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Kata Kunci: peran supervisi manajerial pengawas, biaya operasional sekolah (BOS), pelaksanaan program BOS

**Abstract**

The research aimed to discover (i) the role of managerial supervision of school supervisor at SMKN (Public Vocational Schools) in Soppeng District, (ii) the impact of managerial supervision of school supervisor in implementing Operational Fund Program at SMKN in Soppeng District,(iii) factors which influence supervision in implementing Operational Fund Program to be stated as well conducted or not. The research was qualitative research.The informants of the research were the supervisors of SMKN in Education, Youth and Sport Departement in Soppeng District, the Principals of SMKN in Soppeng District, and School Operational Fund Managemant Team in Soppeng District. The data was collected in 3 stages, namely interview,observation and document. The results of research showed that; (i) the roles of managerial supervision of school supervisor in implementing Operational Fund Program at SMKN in Soppeng District are helping the school in formulating school budgets which referred to central and local government regulation; guiding School Operational Fund committee of education unit level in managing financial aspect which was transparent, efficient, and accountable; implementing the making of financial report made by the principals to the government and stakeholders, (ii) the impacts of managerial supervision of school supervisor in implementing Operational Fund Program toward SMKN in Soppeng District are the existence of Operational Fund Program had positive impact toward the implementation of learning process in school, school administration, laboratorial needs, maintenance of facility and infrastructure, and power and service, (iii) factors which influenced supervision in implementing Operational Fund are good will from the principals to accept suggestions from supervisors, local government regulation in this case the Head of Department to involve supervisor in financial management.

Key word: *The roles of Managerial Supervisions*, *operational Cost of Education Program*, implementation of program BOS

**Pendahuluan**

Upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional yaitu dengan diterapkannya Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah di Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program utama dalam mendukung keberhasilan PMU diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

BOS SMK adalah Program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan di mana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Dana BOS SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasinal sekolah non personalia.

 Dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan diperlukan kinerja kepala sekolah, sebagaimana kita ketahui kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk melaksanaan pengelolaan dan administrasi sekolah. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan kepala sekolah dengan menyusun standar kompetensi guru dan standar kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer dan motivator dapat mendorong dan memotivasi pengelolaan pendidikan seperti guru dan staf TU kepada setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah secara esensial telah mengadopsi garis besar pelaksanaan supervisi manajerial. Permendiknas tersebut mengatur bagaimana kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkenaan dengan kegiatan operasional sekolah, di antaranya dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di sekolah sehingga sekolah akan mampu beroperasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah, pemenuhan standar pendidikan nasional, peningkatan mutu, dan pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya. Kegiatan supervisi manajerial melibatkan kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan tokoh utama yang menerapkan fungsi manajerial di sekolah. Selain itu, kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan di tingkat sekolah sehingga kepala sekolah perlu memahami dengan baik mengenai supervisi manajerial. Selain kepala sekolah, terlibat juga pengawas sekolah yang memiliki peranan yang sangat strategis. Pengawas sekolah merupakan partner kepala sekolah dan sekolah dalam rangka mencapai berbagai tujuan sekolah (Priansa & Somad, 2014: 123). Oleh sebab itu, pengawas sekolah harus memiliki kemampuan manajerial yang lebih tinggi dari guru dan kepala sekolah, agar tugas kepengawasan bisa mencapai hasil yang optimal. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan, guru dan kepala sekolah sebagai sasaran pengawasan adalah mitra kerja pengawas sekolah.

BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia. Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 antara lain meliputi: 1) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, 2) Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, 3) Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, 4) Pembelian peralatan pendidikan, 5) Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai, 6) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, 7) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, 8) Penyelenggaraan praktek kerja industri, 9) Pemeliharaan dan perbaikan ringan saraana dan prasarana sekolah, 10) Langganan daya dan jasa lainnya, 11) Kegiatan penerimaan siswa baru, 12) Pengembaangan sekolah rujukan, 13) Peningkatan mutu proses pembelajaran, 14) Operasional layanan sekolah berbasis TIK dan 15) Pelaporan..

Program dana BOS tersebut relatif baru hingga kurangnya transparansi penggunaan dana. Dalam Sudjana, dkk. (2012: 100) adapun kegiatan yang harus dilaksanakan kepala sekolah dalam melaksanakan standar pembiayaan adalah; (a) anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan pemerintah pusat dan daerah, (b) pengelolaan keuangan sekolah transparan efisien dan akuntabel, (c) sekolah membuat laporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, (d) sekolah memiliki kapasitas untuk mencari dana dengan inisiatif sendiri, (e) iuran sekolah ditentukan berdasarkan kemampuan orangtua peserta didik, (f) sekolah melakukan subsidi silang kepada peserta didik kurang mampu di bidang ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SMK, dilaksanakan pemantauan dan supervisi. Pelaksanaan supervisi dan pemantauan dilakukan secara internal oleh komite sekolah dan Dinas Kabupaten melalui pengawas sekolah (Juknis BOS SMK 2015: 30). Dalam hal ini diharapkan fungsi manajerial sebagai pengawas dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dana BOS mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pelaporan.

Sementara observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengawas yang kurang melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan sekolah, karena dianggap hal yang sensitif.

Dari penjelasan tersebut, maka dibutuhkan sinkronisasi dalam penggunaan dana BOS antara pusat sebagai penyedia anggaran, daerah melalui pengawas sekolah dan sekolah sebagai pengguna anggaran, hingga dalam pelaksanaanya tidak mengakibatkan berbagai masalah baik mengenai bentuk penyaluran dananya maupun dari segi implementasinya, kemudian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, agar mendapatkan gambaran program BOS di lapangan, juga untuk memenuhi tujuan dari pemantauan pelaksanaan standar pembiayaan yang dilakukan pengawas sekolah, serta kita dapat mengetahui bagaimana implementasi terhadap proses pembelajaran khususnya pelaksanaan pendidikan di sekolah menengah kejuruan Negeri di Kabupaten Soppeng.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Penelitian ini menggambarkan fenomena terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dana BOS, peran manajerial pengawas dan menganalisa dampaknya terhadap proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan Negeri di Kabupaten Soppeng.

**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menuliskan gambaran umum tentang profil pengawas sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng, tugas dan tanggung jawab pengelola dana BOS di tingkat kabupaten dan tingkat satuan pendidikan, hasil pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BOS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, monitoring dan supervisi, dan peran pengawas sekolah pada satuan pendidikan yang dibina di Kabupaten Soppeng, dampak peran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan supervisi manajerial pengawas sekolah menengah kejuruan negeri tentang pelaksanaan program BOS di SMK negeri yang ada di Kabupaten Soppeng.

Peran pengawasan manajerial sekolah sangat bermanfaat terhadap perbaikan mutu sekolah dalam pengelolaan manajemen keuangan yang berimbas pada perbaikan proses belajar mengajar. Pengelolalan dana dilakukan dengan transparan hingga membantu mengurangi terjadinya penyelewengan dana juga kebutuhan siswa semakin terpenuhi walaupun belum seperti yang diharapkan, selain itu untuk pengadaan alat tulis kantor dan bahan praktik kejuruan sangat membantu sekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan siswa. Kemudian untuk pembiyaan ujian dan ulangan semesteran dengan dana BOS sangat membantu walaupun porsi yang diberikan tidak mencukupi. Selanjutnya dana BOS dari pengembangan profesi guru adalah kegiatan yang berkaitan dengan kinerja guru, misalnya pembuatan perangkat pembelajaran dan rapat-rapat kerja yang ada hubungannya dengan kegiatan sekolah, pembiayaan kegiatan ekstrakulikuler melalui BOS meskipun belum sepenuhnya dilaksanakan, tapi selama ini kegiatan yang dilakukan sangat membantu peningkatan prestasi siswa. BOS sangat membantu perpustakaan antara lain: adanya pemasangan pengamanan jendela, penambahan buku pelajaran dan buku koleksi serta pengadaan komputer.

Pelaksanaan dana BOS mulai tahun 2013 yang sebelumnya masih R-BOS (Rintisan BOS) sampai dengan tahun 2015 pada sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng, tidak melibatkan semua komponen sekolah, tetapi kepala sekolah membentuk panitia dalam pelaksanaanya yang terdiri dari: Penanggung jawab oleh Kepala Sekolah sendiri, ketua dipegang oleh unsur wakil kepala sekolah atau ketua jurusan, sekretaris yang dipegang oleh guru atau staf tata usaha yang mengerti tentang laporan, bendahara dari guru/tatausaha yang mengerti tentang tata kelola keuangan ditunjuk oleh kepala sekolah, pemeriksa dan penerima barang dari staf tatausaha yang ditunjuk kepala sekolah.

Di sisi lain, kendala yang dihadapi dari segi pelaksanaan penerimaan BOS adalah jadwal penerimaan BOS yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, terkadang bergeser beberapa bulan untuk setiap semesternya, seperti dana semester pertama cair di bulan tiga atau 4, sementara semester 2 cair pada bulan sembilan atau sepuluh. Saiful (2003: 67) mengemukakan bahwa masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah, karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitanya dengan komponen keuangan sekolah. Keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar.

Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk insentif maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran, menurut Fattah (2000: 90) bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya 3 faktor utama yaitu: (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan yang mencakup kualitas tenaga pendidikan, biaya, dan sarana belajar; (2) mutu dan proses balajar mengajar yang dapat mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai.

Kemerosotan mutu pendidikan diakibatkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek kuantitas dan kurang dibarengi dengan aspek kualitasnya, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan undang-undang sistem pendidikan nasional, maka diperlukan reformasi di bidang pendidikan meliputi kecukupan sumber-sumber pendidikan, meliputi antara lain kecukupan sarana administrasi pendidikan dan sarana penunjang perpustakaan, serta pembiayaannya.

Dari hasil penelitian dan pendapat para ahli tersebut bahwa peran supervisi manajerial pengawas terhadap pelaksanaan program BOS pada kegiatan pendidikan di sekolah menengah kejuruan negeri khususnya di Kabupaten Soppeng adalah dampak positif, ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga output pendidikan yang diharapkan tercapai. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) dampak yang ditimbulkan dari BOS tersebut dapat dirasakan langsung oleh seluruh pengelola pendidikan di sekolah yang selama ini dirasakan minim, dengan kondisi ini diharapkan kreativitas dan inovasi dari kepala sekolah untuk memanfaatkan/mengelola dana yang ada sebaik-baiknya; (2) dampak yang ditimbulkan dari BOS tersebut terhadap peningkatan proses pendidikan yang dilakukan guru akan lebih baik; (3) dapat meringankan pembiayaan pendidikan yang selama ini masih dirasakan memberatkan orang tua/wali siswa.

**Pembahasan**

 Berdasarkan hasil analisis pada dimensi pemantauan standar pembiayaan pada pelaksanaan program BOS menjelaskan bahwa pengawas sekolah di Kabupaten Soppeng berperan sebagai seorang supervisor yang memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan. Juknis BOS 2015, Bab VII, poin A.1.b, menjelaskan bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan sebagai bagian tugas ***rutin*** dalam pembinaan sekolah. Dengan demikian pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencangkup seluruh aspek kegitan sekolah, termasuk pelaksanaan program BOS SMK. Hal ini sejalan dengan teori (Sudjana, dkk: 2012) supervisi atau pengawasan pendidikan adalah bantuan profesional kesejawatan yang dilakukan melalui dialog kajian masalah pendidikan untuk menemukan solusi dalam meningkatkan kemampuan profesional kepala sekolah, guru dan staf lainnya guna mempertinggi kinerja sekolah menuju tercapainya mutu pendidikan. Dari teori tersebut peneliti menginterprestasikan bahwa peran pengawas sekolah menengah kejuruan pada pelaksanaan program BOS adalah sebagai supervisor yang ikut serta pada pembuatan RAPBS/RKAS.

Selanjutnya diperoleh keterangan bahwa pengawas sekolah memiliki dokumen pengelolaan sekolah tapi tidak khusus pada pelaksanaan program BOS, lebih umum tentang delapan Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen standar pembiayaan di sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng yang menggambarkan bahwa pengawas sekolah berperan dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah didukung oleh Sudjana (2011: 5) bantuan yang diberikan supervisor kepada yang disupervisi menitik beratkan pada bantuan supervisor pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.

Pengawas sekolah di Kabupaten Soppeng melakukan tugasnya sebagai seorang supervisor berdasar pada Juknis pengelolaan BOS, dan jika terjadi masalah dalam pengelolaan BOS maka pengawas sekolah harus melakukan pembimbingan tentang pengelolaan administrasi untuk meningkatkan kualitas administrasi yang dibuat oleh Panitia BOS. Penjelasan tersebut diperoleh dari hasil penelitian, didukung oleh (Sudjana & Dharma, 2013: 23) pada pengelolaan administrasi bertujuan meningkatnya kemampuan profesial kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan administrasi dan pengelolaan sekolah. *District superintendent is at the center of this educational endeavor* (Petersen, 2007: 2) yang artinya pengawas adalah pusat dari usaha pendidikan.

 Pengawas sekolah di Kabupaten Soppeng melakukan penilaian kinerja terhadap kepala sekolah melalui pelaksanaan pengelolaan BOS dengan melihat kualitas dokumen. Sudjana & Dharma (2013: 24) menyatakan bahwa salah satu kriteria keberhasilan pengawasan manajerial adalah meningkatnya kualitas administrasi sekolah dan meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan pengelolaan sekolah.

 Hasil analisis pada kelemahan hasil penilaian dan administrasi sekolah binaan di sekolah menengah di kabupaten Soppeng diinterprestasikan bahwa pengawas sekolah melaksanakan pembimbingan/pelatihan berdasarkan analisis hasil pemantauan evaluasi pelaksanaan pengawasan pada supervisi manajerial khususnya tentang standar pembiayaan pada program BOS bertujuan agar kualitas dokumen pengelolaan BOS sejalan dengan Juknis guna memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi. Juknis BOS (2015: 10) Pemerintah dan masyarakat menuntut sekolah untuk memberikan layanan yang bermutu kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan sekolah cukup tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu. Adapun peranan pemerintah melalui dana BOS SMK ini adalah:

1. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah bermutu agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (*eskalasi sosial).*
2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

 Sementara itu, dimensi pembimbingan pada indikator kelemahan hasil penilaian dan administrasi sekolah binaan diinterprestasikan bahwa pengawas sekolah di sekolah di Kabupaten Soppeng melatih/membimbing Panitia BOS dalam mengelola administrasi sekolah setelah pengawas sekolah menemukan kelemahan hasil penilaian pada implementasi program BOS dengan menyiapkan: (1) tujuan dan sasaran pembimbingan, (2) materi/ isi program, (3) strategi pelaksanaan program, (4) kriteria keberhasilan program, (5) jadwal kegiatan. Sudjana & Dharma (2013: 23) pengawasan pada hakekatnya adalah tindakan atau kegiatan pembinaan yang terencana dan terprogram. Sudjana, dkk (2012: 103) dalam pemantauan pelaksanaan standar pembiayaan dilakukan oleh pengawas sekolah setiap akhir tahun di sekolah binaannya. Pada setiap semester semua sekolah binaan harus mendapat kunjungan sekurang-kurangnya satu sampai dua kali dalam setiap semester dan salah satu jenis kegiatannya adalah melakukan pemantauan standar pembiayaan. Dari penjelasan yang informan berikan dan dipadankan dengan teori yang ada menguatkan bahwa jika pengawas sekolah memiliki persiapan sebelum melakukan pembimbingan/pelatihan maka akan mampu membantu meningkatkan kemampuan profesional guru khususnya dalam melaksanakan administrasi dan pengelolaan pengawasan sekolah. Wawancara tersebut juga menegaskan bahwa pengawas sekolah melakukan pengelolaan sekolah sebanyak satu kali pembimbingan dalam setahun, pembimbingan akan dilakukan setelah melihat kualitas hasil dokumen sebelumnya tidak sesuai kriteria pengelolaan,

 Hasil yang diperoleh peneliti, bahwa pengawas sekolah melakukan pemantauan dengan melihat hasil pemantauan dan menganalisis hasil penilaian merupakan kriteria dalam mengevaluasi program yang dilaksanakan, ini ditunjukan pula pada teori (Sudjana & Dharma, 2013: 25), dengan menganalisis hasil pemantauan dan mengnalisis hasil penilaian merupakan kriteria dalam mengevaluasi hasil pemantauan. Kemudian pada indikator menganalisis hasil penilaian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh informasi bahwa bentuk evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan adalah pelaporan yang disampaikan pada kepala dinas dan kepala sekolah untuk diketahuai dan dilakukan tindak lanjut sebagai bahan melakukan perbaikan program kerja pengawasan, sebagaimana penjelasan pada Pasal 3 ayat 2a dan 2b Tentang Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan “bahwa Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana dan sistematis dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal”. Ini juga menjelaskan tentang dimensi menyusun laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut pada pelaksanaan program BOS pada indikator supervisi manajerial.

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa kepala sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng memiliki kemampuan dalam pembuatan administrasi serta mekanisme pelaksanaan program BOS berdasarkan aturan pemerintah daerah dan pusat yang tertuang dalam Juknis, pengawas sekolah membantu meningkatkan mutu kualitas administrasi sekolah, Panitia BOS memahami tugas pokok dan tanggung jawab mereka. (Sudjana, 2011: 19) keberhasilan supervisi pendidikan di tentukan oleh banyaknya faktor salah satunya adalah kolaborasi antar tiga unsur penentu pendidikan yakni supervisor, kepala sekolah, guru beserta staf sekolah lainnya.

**Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya serta disesuaikan dengan data observasi dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

* + - 1. Peran Pengawas Sekolah dalam aspek supervisi manajerial untuk pelaksanaan program BOS di sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng yaitu:
1. Membantu sekolah dan Panitia BOS dalam merumuskan anggaran sekolah yang merujuk pada peraturan pemerintah pusat (Juknis BOS) dan daerah.
2. Membina sekolah dan Panitia BOS dalam hal pengelolaan keuangan sekolah yang transparan, efesien dan akuntabel.
3. Mengimplementasikan pembuatan laporan keuangan yang dibuat sekolah kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
	* + 1. Adapun dampak supervisi manajerial pengawas dalam pelaksanaan program BOS terhadap sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut.
	1. Kinerja sekolah semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.
	2. Pemanfaatan dana BOS yang selama ini dikelola sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Juknis pengelolaan dana BOS.
	3. Pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, administrasi sekolah, anggaran perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana sekolah, daya dan jasa.
		* 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pengawas Sekolah dalam melaksanakan supervisi program Dana BOS adalah sebagai berikut:
4. Dukungan dari pihak Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng.
5. Perhatian dan kerja sama pihak sekolah dan pengelola/panitia BOS
6. Keterbukaan Kepala Sekolah tentang informasi pembiayaan sekolah khususnya program dana BOS.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pengawas Sekolah agar selalu tetap giat berdedikasi melaksanakan pemantauan Standar Nasional Pendidikan termasuk komponen pembiayaan yang merupakan bagian paling penting dari penjaminan mutu pendidikan
2. Pengawas Sekolah bersama dengan tim manajemen BOS tingkat kabupaten dapat membuat jadwal tetap Bimbingan Teknis dalam memberikan bimbingan dan saran kepada kepala sekolah, dan Panitia BOS, terhadap kelemahan yang ditemukan, bagaimana cara pemecahan masalahnya, agar pelaksanaan dana sekolah sesuai dengan standar pembiayaan pada tahun berikutnya.
3. Kepala Sekolah diharapkan dalam mengelola dana BOS agar mengikuti pentunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Selanjutnya mengumumkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah.
4. Bagi guru diharapkan adanya partisipasi aktif dalam memanfaatkan dana BOS dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan akhir dari pemberian dana BOS tersebut dapat tercapai dengan baik.
5. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, agar dapat memberikan dukungan moril kepada Pengawas Sekolah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan supervisi pelaksanaan dana BOS dengan cara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penugasan agar tidak lagi ragu dalam melakukan tugasnya.

**Ucapan Terimakasih**

Terima kasih kepada Prof. Dr. Husain Syam, M.TP, selaku Rektor Universitas Negeri Makassar, sebagai sosok yang selalu mengajarkan prinsip semangat hidup dan perjuangan ikhlas, Prof. Dr. Jasruddin, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, yang selalu memberikan kemudahan layanan, serta fasilitas yang baik bagi penulis dan teman-teman selama mengikuti perkuliahan, Prof. Dr. Suradi Tahmir, M.S., selaku Asisten Direktur 1 yang telah memberi kemudahan serta semangat kepada penulis di setiap perkuliahan, Prof. Dr. H. Andi Ihsan, M.Kes., selaku Asisten Direktur 2, sosok kharismatik yang mengagumkan yang telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis, Prof. Dr. Ruslan, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Kekhususan Kepengawasan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, sebagai sosok orang tua yang bersahaja dan berwibawa, selalu mengayomi anak-anaknya, senantiasa mendampingi, memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan memberi petunjuk teknis sejak dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian studi penulis.

**Daftar Pustaka**

Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan:Tinjauan Teori dan Praktek.* Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.

Ahmad. Djauzak. 1996. *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan disekolah Dasar,seri* 1. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Depdikbud.

Barnawi&Arifin Mohammad. 2014. *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah.* Yogyakarta:Ar-ruzz Media.

Brewer, E. W. 2012.Leadership Characteristics of the Ideal School Superintendent *University of Tennessee, International Journal Vol.46 no*

Devono,F., Price,T. 2012 *National Forum Of Educational Administration And Supervision Journal* *. International Journal*. Vol 29, NUMBER 4.

Direktorat Pembinaan SMK, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Petunjuk Teknis BOS SMK.* Jakarta.

Hendarman. 2015. *Revolusi Mental Pengawas Sekolah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Kompri. 2015. *Manajemen Pendidikan:Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah.*Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.

Memizoglu, Pasa Salih. 2014. *General Problems Encountered in General Inspections of Primary Schools According to the Views of Inspectors and Principals. International Journal on New Trends in Education and their implication.* Turkey: Aban Izzet Baysal University.

Moloeng, lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.*

Petersen, G. J., Sayre C. W., Kelly, V. L., 2006. *What Teacher Think An Investigationa of Teacher’s Perception Reading the Superintendent’s Influence On Instruction and Learning. International Journal*. Vol II.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Rival dan Murni, 2009. *Educational Manajement.* Jakarta: PT Raja Gravindo Persada

Priansa, Donni Juni & Somad, Rismi. 2014. *Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah.* Bandung: CV.Alfabeta.

Saani, A. J., 2013. *International Journal of Business and Social Science. International Journal. Vol. 4 No. 17.*

Sagala, Syaiful. 2012. *Supervisi Pembelajaran*. Bandung: Alfabet

Sudjana, Nana.H. 2012. *Pengawas dan Kepengawasan.* Cikarang: Bina Mitra Publishing.

Sudjana, Nana., & Dharma, surya. 2013. *Menyusun program pengawasan.* Jakarta: Bina Mitra Publishing.

Sudjana, Nana., Dharma, Surya., & Wastandar. 2012. *Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (Panduan Bagi Pengawas Sekolah).* Bekasi: Bina Mitra Publishing.

Yunus, Falah. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan.* (online, http://www.geocities.ws/guruvalah/Manaj\_Pening\_Mutu\_Pend.html, diakses tanggal 28 Mei 2016).